

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI
PARTAI POLITIK LOKAL DALAM MENYALURKAN ASPIRASI
POLITIK MASYARAKAT DI DESA PULO PIKU KECAMATAN
DARUL HASANAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

PROPOSAL

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat guna
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

OLEH

**SUBUR S
NPM. 0902060024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 28 Maret 2016, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Subur S
NPM : 0902060024
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Lokal dalam Menyalurkan Aspirasi Politik Masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

PANITIA PELAKSANA

Ketua

Sekretaris

Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd

Dra. Hj. Svamsuurnita, M.Pd

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hotma Siregar, SH, MH
2. Koprari Nasution, SH, M.Pd
3. Drs. Zulkifli Amin, M.Si

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skrripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Subur S
N.P.M : 0902060024
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Lokal dalam Menyalurkan Aspirasi Politik Masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara
sudah layak disidangkan.

Medan, Februari 2015

Disetujui oleh:

Pembimbing

Drs. Zulkifli Amin, M.Si

Diketahui oleh:

Dekan

Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd.

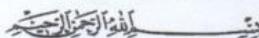
Ketua Program Studi

Hotma Siregar, SH, MH.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Subur S
N.P.M : 0902060024
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Lokal dalam Menyalurkan Aspirasi Politik Masyarakat di Desa Pulo Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28-08-2015	Bimbingan Skripsi	<i>[Signature]</i>	
30-08-2015	revisi Bab I	<i>[Signature]</i>	
1-09-2015	revisi Bab II	<i>[Signature]</i>	
04-09-2015	revisi Bab III	<i>[Signature]</i>	
06-09-2015	Bimbingan Bab IV	<i>[Signature]</i>	
09-09-2015	revisi Bab IV	<i>[Signature]</i>	
27-09-2015	Bimbingan Bab V	<i>[Signature]</i>	
28-09-2015	revisi Bab V	<i>[Signature]</i>	

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

[Signature]

Hotma Siregar, SH, MH

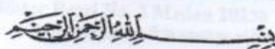
Medan, Februari 2015
Dosen Pembimbing

[Signature]

Drs. Zulkifli Amin, M.Si

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Subur S
 N.P.M : 0902060024
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Proposal : Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Lokal dalam Menyalurkan Aspirasi Politik Masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 16 Februari 2015

Hormat saya
 Yang membuat pernyataan,



Subur S

Diketahui oleh Ketua Program Studi
 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lotma Siregar, SH, MH

ABSTRAK

SUBUR S, NPM 0902060024. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM MENYALURKAN ASPIRASI POLITIK MASYARAKAT DI DESA PULO PIKU KECAMATAN DARUL HASANAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Lokal dalam Menyalurkan Aspirasi Politik Masyarakat Di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara dengan jumlah Populasi sebanyak 150 KK. Sampel dalam penelitian ini diambil 20% dari jumlah Populasi yaitu sebanyak 30 Kepala Keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, angket dan wawancara.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM MENYALURKAN ASPIRASI POLITIL MASYARAKAT DI DESA PULO PIKU KECAMATAN DARUL HASANAH KABUPATEN ACEH TENGGARA** ”

Penulis skripsi tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan arahan dan motivasi dari berbagai pihak terutama sekali untuk orang tua penulis. Selain itu juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Istri dan anak saya, Nuriyati (Istri) dan Asykar Mahier Rizal (anak) yang menjadi inspirasi saya untuk terus berjuang dalam hidup.
2. Bapak Rudianto,S.sos.,M.si , selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Abrar Adhani,S.sos.,M.i.kom.selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Irwan Syari Tanjung,S.sos,M.AP pembimbing I yang dengan tulus dan sabar membimbing, memberikan arahan, meluangkan banyak waktu dan nasehat serta memberikan motivasi selama menyusun skripsi ini.

5. Bapak Lutfi Basith, S.sos, M.i.kom pembimbing II yang dengan tulus dan sabar membimbing, memberikan arahan, meluangkan banyak waktu dan nasehat serta memberikan motivasi selama menyusun skripsi ini.
6. Bapak Pimpinan beserta seluruh karyawan PT.Nippon Indosari Corpindo Tbk. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Teman-teman kuliah di FISIPOL UMSU kelas A3 Malam yang telah memberikan dukungan kepada penulis agar terus bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga skripsi ini menjadi amal jariyah bagi semua pihak. Amin.

Medan, 09 September

2015

Subur S

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	71
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Masalah.....	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori.....	8
1. Pengertian Persepsi Masyarakat.....	8
2. Pengertian Partai Politik.....	9

	10
3. Partai Politik Lokal Aceh	11
4. Tujuan Partai Politik Lokal di Aceh.....	13
5. Fungsi Partai Politik Lokal di Aceh	15
B. Kerangka Berpikir	17
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	19
A. Lokasi Penelitian.....	19
B. Populasi dan Sampel	20
1. Populasi Penelitian	20
2. Sampel Penelitian.....	20
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	21
1. Variabel Penelitian	21
2. Defenisi Operaasional	21
D. Teknik Pengumpulan Data.....	21
E. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	24
B. Pembahasan/Analisis Data	27
C. Pembahasan Hasil Penelitian	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Fungsi partai politik dalam negara demokrasi	16
Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan umur.....	25
Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan	26
Tabel 4. Apakah anda mengetahui fungsi dari pada partai poitik lokal di Aceh	27
Tabel 5. Apakah anda mengetahui jumlah partai politik lokal saat ini	28
Tabel 6. Apakah pengurus partai politik lokal di daerah anda pernah mensosialisasikan partai politiknya di desa anda	29
Tabel 7. Apakah partai politik lokal selalu aktif dalam memberikan penyuluhan- penyuluhan kepada masyarakat di desa anda dalam melaksanakan pendidikan politik.....	30
Tabel 8. Apakah partai politik lokal sering memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat di desa anda	31
Tabel 9. Apakah partai politik lokal sering memberikan sosialisasi pada masyarakat hanya dalam bentuk kampanye	32
Tabel 10. Apakah anda pernah memberikan kritikan atau saran kepada partai politik lokal di daerah anda	33

- Tabel 11. Apakah partai politik lokal sering mensosialisasikan program-program pemerintah serta melibatkan elemen-elemen masyarakat di daerah anda..... 34
- Tabel 12. Apakah partai politik lokal pernah melakukan sosialisasi kaderisasi kepada masyarakat di desa anda..... 35
- Tabel 13. Apakah dalam mengkader anggota-anggotanya partai politik lokal hanya berasal dari kalangan elit atau kalangan yang berstrata tinggi. 36
- Tabel 14. Apakah partai politik lokal sering memberikan informasi tentang perpolitikan diwilayahnya kepada anda 37
- Tabel 15. Apakah partai politik pernah mengadakan komunikasi (dialog) antara masyarakat dengan DPR untuk memperjuangkan kepentingan rakyat 38
- Tabel 16. Apakah partai politik lokal memberikan kesempatan kepada masyarakat dari semua golongan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan politiknya 39
- Tabel 17. Apakah partai politik lokal menjalankan fungsinya menciptakan iklim yang kondusif di daerah anda 40
- Tabel 18. Apakah partai politik lokal menjalankan fungsinya sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kepentingan ataupun tuntutan kepada pemerintah..... 42

Tabel 19. Apakah partai politik lokal sebagai penyemangat dalam pembentukan karakter politik di desa anda.....	43
Tabel 20. Apakah anda mengetahui tujuan dari partai politik lokal	44
Tabel 21. Apakah anda mengetahui sejarah dari partai politik lokal di Aceh	46
Tabel 22. Apakah partai politik lokal hanya melakukan sosialisasi ketika mau Pilkada saja.....	47
Tabel 23. Apakah partai politik lokal menjalankan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat di desa anda	48
Tabel 24. Tabulasi Jawaban Responden Secara Keseluruhan	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rirawat hidup.....	71
2. Lampiran K1	72
3. Lampiran K2	73
4. Lampiran K3	74
5. Lampiran Pengesahan Proposal	75
6. Lampiran Berita Acara Bimbingan Proposal	76
7. Lampiran Surat Keterangan	77
8. Surat Pernyataan.....	78
9. Lampiran Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal	79
10. Lampiran Berita Acara Seminar Proposal Skripsi	80
11. Lampiran Balasan Surat Riset.....	81
12. Lampiran Bimbingan Skripsi	82

BABI

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik diharapkan dapat melakukan sosialisasi politik, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sebagai sarana mempersiapkan kader, sebagai media menyalurkan kepentingan masyarakat, partisipasi politik, sebagai peredam konflik, dan melakukan komunikasi politik atas dasar kepentingan rakyat dan penguasa. Namun, pada kenyataannya fungsi partai politik tersebut tidak berjalan dengan baik. Partai politik belum menunjukkan *performance* yang memuaskan bahkan semakin hari makin memperlihatkan gejala elitisme dalam pembuatan kebijakan dengan mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan daripada kepentingan masyarakat dan bangsa. Keberadaan partai politik juga saat ini masih merupakan suatu institusi yang memiliki potensi menjadi alat konflik masyarakat daripada sebagai peredam konflik, hal ini terlihat dari adanya pertikaian dan perpecahan antar partai politik.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan fungsi partai politik tidak berjalan dengan baik, keberadaan partai politik belum mampu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, malah menjadi sebaliknya dimana partai politik cenderung sibuk memperebutkan kekuasaan, jabatan, dan uang. Sementara persoalan yang membelit rakyat dibiarkan begitu saja, seperti ketidakadilan, kemiskinan, ketidakamanan serta ancaman rasa takut akan konflik horizontal

maupun vertikal. Padahal ketika pendirian partai politik atau kampanye pemilu selalu yang dijanjikan akan membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Akan tetapi semuanya adalah hanya janji semata.

Keberadaan partai politik lokal di Aceh merupakan hasil kompromi politik antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam rangka menghasilkan perdamaian di Aceh.

Dalam penandatanganan *MoU (Memorandum Of Understanding)* 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM di Helsinki, Finlandia, terdapat beberapa butir kesepakatan yaitu pemberian amnesty kepada anggota GAM berikut pemulihan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu bentuk pemulihan hak politik yang begitu ramai dibicarakan adalah keinginan GAM membentuk partai politik lokal di Aceh.

Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan harapan baru bagi demokratisasi politik dan perdamaian di Aceh. Penerapan MoU Helsinki telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Partai politik lokal di Aceh di harapkan mampu menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat di daerah-daerah secara lebih tepat mengingat beragamnya kepentingan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia.

Partai politik lokal dianggap lebih mampu untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang amat sempit tersebut. Bisa

saja ada partai politik yang hanya ingin menjadi partai politik lokal saja karena hanya seperti itu kemampuannya. Atau partai politik lokal tersebut lebih tertarik pada masalah politik ditingkat lokal sehingga hanya berminat mengajukan calon dalam pemilu ditingkat lokal (bahkan mungkin hanya di satu provinsi) konsep partai politik lokal akan dapat menampung aspirasi seperti itu.

Partai politik lokal di Aceh mempunyai tujuan dan fungsi yang hampir sama dengan partai politik nasional pada umumnya. Tujuan umum (mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 , mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh) dan tujuan khusus (meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh).

Sementara fungsi partai politik lokal di Aceh ada empat yaitu, pertama memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, kedua penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, ketiga penyaluran aspirasi politik rakyat dan keempat partisipasi politik rakyat (terdapat dalam pasal 79 Undang-Undang Pemerintahan Aceh).

Perkembangan partai politik lokal di Aceh mengalami pasang surut, hal ini bisa dilihat dari jumlah partai politik lokal saat ini yang ada di Aceh yang hanya berjumlah tiga partai saja yaitu Partai Aceh (PA), Partai Damai Aceh (PDA) dan Partai Nasional Aceh (PNA). Sementara pada pemilu tahun 2009 yang lalu, ada enam partai politik lokal di Aceh yaitu : Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA).

Jumlah ini akan terus mengalami penurunan dan penyusutan sebagai akibat dari undang-undang pemilu serta belum terlaksananya fungsi partai politik secara baik.

Saat ini muncul kesadaran di kalangan masyarakat bahwa mereka selama ini hanya dijadikan obyek oleh partai-partai politik dengan janji-janji manis. Namun setelah berkuasa, janji itu kemudian dilupakan. Bahkan ada yang berpendapat, semua partai politik itu sama, tidak ada bedanya antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka hanya memperlakukakan rakyat dengan mencari dukungan untuk berkuasa. Setelah berkuasa lalu rakyat dilupakan dan ditinggalkan. Sehingga muncul pandangan bahwa partai politik hanya merupakan simbol atau atribut demokrasi yang hanya untuk dipandang saja, bukan untuk dirasakan atau dinikmati keberadaannya melalui pelaksanaan fungsinya. Dampak posisi partai politik yang seperti ini akan berpengaruh terhadap keberadaan partai politik sebagai lembaga demokrasi telah tersingkirkan dari kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti dan membahasnya lebih jauh dan rinci lagi dengan mengangkatnya dalam sebuah laporan penelitian dengan judul “ **Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Lokal dalam Menyalurkan Aspirasi Politik Masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi Masalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap partai politik lokal di Aceh.
2. Persepsi masyarakat tentang tujuan partai politik lokal di Aceh.
3. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi partai politik lokal di Aceh dalam menyalurkan aspirasi politik masyarakat.

C. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya pembatasan masalah, hal ini diperlukan agar penelitian dapat berjalan tepat pada sarannya. Dengan demikian yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

“Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi partai politik lokal di Aceh dalam menyalurkan aspirasi politik masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.”

D. Rumusan Masalah

Dari uraian batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tujuan partai politik lokal di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara”
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi partai politik lokal dalam menyalurkan aspirasi politik masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara?

E. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian perlu diketahui maksud dan tujuan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang tujuan partai politik lokal di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap fungsi partai politik lokal dalam menyalurkan aspirasi politik masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis :

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta cara berpikir penulis tentang pelaksanaan fungsi partai politik lokal di Aceh.

2. Bagi pemerintah dan partai politik lokal :

Sebagai masukan kepada pemerintah dan partai politik lokal di Aceh tentang pentingnya melaksanakan fungsi partai politik dengan baik.

3. Bagi tokoh masyarakat :

Sebagai masukan bagi tokoh masyarakat tentang peran partai politik lokal di Aceh dalam menyalurkan aspirasi politik masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan tanggapan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk menanggapi suatu permasalahan yang terjadi. Proses ini terjadi melalui pengamatan panca indera mereka.

Menurut Rahmad (2000:51), persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Sedangkan Winardi (2004:204) mengatakan persepsi meliputi aktivitas menerima peraturan dan menerjemahkan atau menafsirkan aturan sedemikian rupa, hingga ia dapat mempengaruhi perilaku dan bentuk sikap.

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan persepsi merupakan gambaran umum dari proses bagaimana seseorang melihat, memahami dan menilai sesuatu, yang pada akhirnya akan memunculkan tanggapan aktivitas untuk memberi penafsiran kepada objek tertentu.

Konsep tentang masyarakat menurut pandangan Durkheim, (dalam Gatara, 2007:64) adalah sinergisitas individu-individu yang membentuk realitas sosial spesifik yang memiliki karakteristik keterkaitan pada segala peraturan moralitas, hukum, negara dan tuhan atau agama.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2009:116) Masyarakat juga sering dikatakan sebagai sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah, saling berinteraksi.

Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adalah pemahaman ataupun pandangan dari sekumpulan manusia yang berada dalam satu wilayah dalam menafsirkan hal-hal yang terjadi di sekitar mereka yang di proses melalui panca indera mereka.

2. Pengertian Partai Politik

Partai politik mempunyai arti yang sangat beragam, banyak ahli yang memberi pengertian yang berbeda-beda tentang partai politik. Diantaranya Friendrich (dalam Surbakti,2010:148) memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materil dan idil kepada anggotanya.Soltau (dalam Surbakti,2010:148) menjelaskan partai politik sebagai yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik, dan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat.

Hugopian (dalam Fadjar,2013:13) partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Neumann (dalam Fadjar,2013:14) partai politik adalah organisasi artikulasi yang terdiri dari

pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas.

Surbakti (2010:148) juga merumuskan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mendefinisikan bahwa:

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan partai politik adalah perkumpulan pelaku-pelaku politik dalam masyarakat yang memiliki tujuan yang sama dan terorganisir guna untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan

dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara:

3. Partai Politik Lokal Aceh

Isu partai politik lokal di Aceh muncul pasca penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Keberadaan partai politik lokal ini sendiri merupakan realisasi pemulihan hak politik bagi para mantan anggota GAM.

Pembentukan partai politik lokal di Aceh tercantum dalam Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka Poin 1.2 tentang partisipasi politik yakni :

Poin 1.2.1 Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.

Poin 1.2.2 Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.

Poin 1.2.3 Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009.

Pada saat ini, khususnya di Aceh partai politik lokal diperkenankan hadir berdampingan dengan partai politik nasional. Menurut Pamungkas (2012:212) mengatakan bahwa partai politik lokal di Indonesia telah ada sejak pelaksanaan pemilu pertama kali digelar di Indonesia Tahun 1955. Namun pada perkembangannya, partai politik lokal tersebut kemudian tenggelam oleh kebijakan penguasa yang tidak memberi ruang hidup bagi partai politik lokal.

Menurut Feith (dalam Fadjar, 2013 : 67) disebut sejumlah partai politik pada pemilu 1955 “kelompok kecil yang bercakupan daerah” yaitu:

- Gerinda – Yogyakarta;
- Partai Persatuan Daya – Jawa Timur;
- AKUI – Madura;
- Partai Rakyat Desa (PRD) – Jawa Barat;
- Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM) – Jawa Barat;
- R. Soedjono Prawirosoedarso dkk – Madiun;
- Gerakan Pilihan Sunda (GPS) – Jawa Barat;
- Partai Tani Indonesia – Jawa Barat;
- Raja Keprabonan dkk – Cirebon Jawa Barat;
- Gerakan Banteng – Jawa Barat;
- Partai Indonesia Raya (PIR) – Nusa Tenggara Barat Lombok;
- PPLM Idrus Effendi – Sulawesi Tenggara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh Pasal 1 menjelaskan bahwa :

Ayat (1) Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Ayat (2) Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

Menurut Abdul Mukthie Fadjar (2013:65) menjelaskan bahwa secara umum partai politik lokal adalah partai politik yang berbasis atau mengandalkan dukungannya semata-mata pada suatu wilayah atau daerah saja dari suatu negara.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partai politik lokal adalah kumpulan dari sekelompok masyarakat yang jaringannya terbatas pada suatu daerah atau wilayah tertentu untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan serta memperjuangkan kepentingan anggotanya, masyarakat, bangsa dan negara dengan cara yang sah.

4. Tujuan Partai Politik Lokal di Aceh

Menurut Sullivan (dalam Fadjar,2013:65) Tujuan partai politik lokal berbeda-beda, namun secara umumnya dapat dikategorikan tiga macam sebagai berikut :

- a. Hak Minoritas, partai politik lokal bertujuan melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan pendidikan kelompok minoritas tertentu, antara lain parpol lokal di Finlandia, Belgia, dan sebagainya.
- b. Memperoleh Otonomi, partai politik lokal menginginkan otonomi atau peningkatan otonomi untuk daerahnya, antara lain partai politik lokal di Spanyol, India, Srilanka, dsbnya.
- c. Mencapai Kemerdekaan, partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka dan pembentukan negara baru, antara lain partai politik lokal di Turki (suku kurdi), Skotlandia dan Wales yang merdeka dari kerajaan Inggris Raya, di Kanada (Partai Quebecois).

Menurut Pamungkas (2012:207) Karakteristik partai lokal di setiap negara pada dasarnya berbeda-beda baik dari sistem partai politiknya ataupun dari tujuan

partai lokalnya. Terdapat dua pola sistem kepartaian politik lokal, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Pada sistem partai politik lokal terbuka, partai lokal berhak mengikuti kompetensi untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik yang bersifat nasional melalui pemilu nasional. Sementara dalam sistem partai lokal tertutup, partai politik lokal hanya dapat berkompetensi pada pemilu lokal. Pada sistem yang tertutup, jika partai lokal berkehendak memiliki pengaruh politik di tingkat nasional maka ia harus berkolaborasi dengan partai politik nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh terdapat tujuan partai politik lokal. Tujuan tersebut dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus (pasal 78 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan :

1. Tujuan Umum Partai Politik Lokal adalah :
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
 - b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan Rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.
2. Tujuan Khusus Partai Lokal adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.
3. Tujuan Partai Politik Lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diwujudkan secara konstitusional.

Dari berbagai pendapat diatas menjelaskan bahwa partai politik lokal diharapkan mampu meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat Aceh dalam mengelola dan memajukan daerahnya serta memperjuangkan aspirasi

masyarakat Aceh dalam berbangsa dan bernegara dengan cara yang baik sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

5. Fungsi Partai Politik Lokal di Aceh

Dalam mengukur kinerja partai politik maka pelaksanaan fungsi partai politik dapat dijadikan alat ukur untuk menilai kinerja partai politik. Adapun fungsi-fungsi partai politik menurut Romli (2003:213) yang meliputi : pertama, melakukan sosialisasi politik, yakni proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Kedua, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Ketiga, sebagai sarana mempersiapkan dan melatih kader partai politik untuk dimajukan menjadi calon pemimpin bangsa. Keempat, sebagai media pemadu kepentingan dengan merepresentasikan, menghimpun (agregasi) dan mengartikulasikan segenap kepentingan yang beragam di masyarakat. Kelima, melakukan partisipasi politik dengan secara aktif dan proporsional berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, baik dengan mengkritisi ataupun menyusun dan menyediakan alternatif-alternatif kebijakan. Keenam, menjadi institusi pengendali dan peredam konflik. Ketujuh, melakukan komunikasi politik baik yang berlangsung atas dasar kepentingan rakyat (*bottom up*) maupun pemerintah dan negara (*top down*).

Menurut Caton (dalam pamungkas:2012, 20), dalam negara demokrasi dari berbagai fungsi partai politik yang ada sebenarnya terdapat empat fungsi sentral partai politik. Pertama adalah fungsi artikulasi kepentingan yaitu mengembangkan

program-program dan kebijakan pemerintah yang konsisten. Kedua, fungsi agregasi kepentingan, memungut tuntutan masyarakat dan membungkusnya. Ketiga, rekrutmen politik, yaitu menyeleksi dan melatih orang untuk posisi-posisi di eksekutif dan legislatif. Keempat, mengawasi dan mengontrol pemerintah.

Tabel 2.1
Fungsi partai politik dalam negara demokrasi

Posisi Partai Politik	Fungsi Partai Politik		
	Artikulasi	Agregasi	Rekrutmen
Pemerintah	Melaksanakan kebijakan	Melanggengkan Dukungan Kepada Pemerintah	Mengisi posisi-posisi pemerintahan
Oposisi	Mengembangkan alternatif	Mendapatkan dukungan untuk perubahan	Membangun Kelompok yang kompeten

Sumber: Caton (dalam Pamungkas, 2012:20)

Menurut Anggara (2013:85) dalam sistem politik demokrasi, partai politik biasanya melaksanakan empat fungsi berikut :

1. Sarana komunikasi politik, partai politik menyalurkan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, melakukan diskusi dan penyebarluasan atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Sarana sosialisasi politik, partai politik mengimplementasikan ideologi dan cita-citanya dalam bentuk program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat agar mendukungnya dalam pemilu.
3. Sarana rekrutmen politik, tujuan partai politik adalah meraih kekuasaan. Untuk itu, dilakukan rekrutmen terhadap pemimpin politik yang mampu menopang kekuasaan yang mereka raih.
4. Sarana pengatur konflik, partai politik berperan dalam menjembatani berbagai konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Sementara itu, Pamungkas (2012:206) menyatakan secara umum fungsi partai politik lokal tidak jauh berbeda dengan partai politik nasional. Kedua jenis partai ini mempunyai fungsi yang sama yaitu mengagregasi kepentingan masyarakat. Namun yang membedakan partai politik lokal dan partai politik nasional itu adalah terletak pada tingkatnya. Partai politik nasional mengagregasi kepentingan nasional, sedangkan partai politik lokal hanya mengagregasi kepentingan daerahnya saja.

Dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa partai politik lokal berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota masyarakat;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat;
- c. Penyaluran aspirasi politik rakyat; dan
- d. Partisipasi politik rakyat.

Dengan demikian fungsi partai politik lokal di Aceh yaitu melaksanakan Pendidikan politik bagi anggota masyarakat , penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat,penyaluran aspirasi politik rakyat, serta meningkatkan partisipasi politik rakyat. Keempat fungsi tersebut hanya dilakukan di tingkat daerah saja yaitu hanya di Aceh.

B. Kerangka Berfikir

Perjanjian Helsinki (2005) merupakan titik awal keberadaan partai politik lokal di Aceh. Keberadaan partai politik lokal juga diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang

diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Ketentuan tentang partai politik lokal tercantum dalam bab XI Partai Politik Lokal, pasal 75 sampai dengan pasal 95 dan ketentuan mengenai partai politik lokal juga telah direalisasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Partai politik lokal di Aceh dapat dibentuk oleh semua warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh. Kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan bukti perkembangan demokrasi di Indonesia. Keberadaan partai politik lokal merupakan solusi bagi masyarakat dalam menyampaikan berbagai kepentingannya sehingga dapat secara cepat tersalurkan.

Partai politik lokal harus bisa menjalankan fungsinya secara optimal serta menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat agar partai politik lokal mendapat dukungan dan kepercayaan dari rakyat sehingga dapat tumbuh dan berkembang di Aceh.

Keberadaan politik lokal di Aceh kian mengecil di bandingkan dengan pada awal terbentuknya dan bisa saja dalam perkembangan selanjutnya partai politik lokal juga kehilangan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat sehingga partai politik lokal yang ada di Aceh pada saat ini tidak akan hidup dalam waktu yang lama. Hal ini diakibatkan kurangnya dukungan dari masyarakat karena tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi dan peranan partai politik lokal dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat,

penyaluran aspirasi politik rakyat serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Jauhari (2007:34) Metodologi Penelitian merupakan alat, prosedur dan teknik yang sistematis yang digunakan dalam melaksanakan penelitian atau dalam menyimpulkan data. Sementara itu, Sugiyono (2008:2) mengatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metode deskriptif. Menurut Arikunto (2006:78) penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam penelitiannya tidak memerlukan hipotesis.

Penelitian deskriptif menurut Setiawan (2013:28) tidak dimaksud untuk menguji hipotesis, akan tetapi lebih diarahkan kepada pemaparan fenomena-fenomena yang muncul dalam suatu penelitian dan lebih mengutamakan pemaknaan.

A. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh. Adapun batas-batas lokasi penelitian sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan	:Desa Pulo Gadung
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Desa Istikamah
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Desa Tengkute
Sebelah Barat berbatasan dengan	: Desa Kuta Pasir

Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena di desa ini belum pernah diadakan penelitian sebelumnya. Serta lokasi penelitian ini berdekatan dengan rumah peneliti sehingga dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan aspek yang akan diteliti atau sebagian tempat untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian maka populasi ini adalah sumber penelitian. Menurut Arikunto (2010:173) mengatakan: “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara yang berjumlah 150 Kepala Keluarga.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian orang yang dipandang dapat mewakili populasi untuk dijadikan sumber data, sumber informasi dalam penelitian ilmiah.

Menurut Arikunto (2010:175) mengatakan: sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, sebaliknya jika subjeknya besar atau lebih dari 100 maka dapat diambil 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih tergantung pada kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu dan dana”. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 20% dari jumlah populasi yang ada yaitu sebanyak 30 Kepala Keluarga.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara acak sederhana atau *random sampling*.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Jumlah variabel dalam penelitian ini adalah 1 (satu), yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Lokal dalam menyalurkan aspirasi politik masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Defenisi Operasional

Yang menjadi definisi operasional dari variabel dalam penelitian ini adalah persepsi dari suatu masyarakat terhadap perkembangan partai politik lokal mulai dari sejarah, keberadaannya, dan melaksanakan fungsi partai politik lokal.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data observasi, Angket dan Wawancara. Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi, melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui terhadap obyek serupa di daerah lain sebagai bahan pertimbangan.
2. Angket, Menurut Arikunto (2010:268) angket memiliki banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpulan data angket dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan disertai jawaban dalam bentuk tulisan kepada respondendan responden akan menjawab dengan keadaan sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis data karena pertanyaan dan alternatif jawaban yang diajukan sama kepada setiap responden.
3. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data secara lisan dengan cara bertanya langsung kepada responden, dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi untuk mendukung data yang diperoleh melalui observasi dan angket.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun dan kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap masalah-masalah yang aktual berdasarkan data-data yang sudah terkumpul dari penelitian. Maka dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan statistik sederhana dengan menggunakan rumus persen tase :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

P = Presentase pertanyaan yang dijawab

f = Frekuensi Jawaban

N = Jumlah Responden

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pulo Piku merupakan salah satu desa di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, terdiri atas tiga dusun, yaitu : Lawe Nimber, Lawe Lisung, dan Lawe Salak Belang dengan jumlah penduduk sebanyak 150 Kepala Keluarga (KK). Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara menemukan data dan informasi yang penting dan berguna untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya menyangkut tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Lokal Dalam Menyalurkan Aspirasi Politik Masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara”.

Untuk mengetahui hasil penelitian secara keseluruhan, maka pembahasan yang dilakukan berdasarkan data-data yang terkumpul dari lapangan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan. Data tersebut dianalisis dengan tabel frekuensi yang telah diperoleh melalui observasi, penyebaran angket dan wawancara kepada masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Penulis membuat 20 pertanyaan berupa angket ditujukan kepada 30 kepala keluarga sebagai responden.

Hal yang sangat penting yang harus diketahui adalah bagaimana tanggapan masyarakat tentang Perkembangan Partai Politik Lokal di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

Masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah merupakan sekumpulan individu yang menggabungkan diri menjadi suatu kelompok. Adapun suku-suku yang bertempat tinggal di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah adalah seluruhnya suku Alas dan keseluruhan penduduknya beragama Islam.

1. Identitas Responden

Berikut ini akan disajikan data responden menurut umur dan jenjang pendidikan.

Tabell

Distribusi responden berdasarkan umur

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	20-29 tahun	8	26,6%
2.	30-39 tahun	8	26,6%
3	40-49 tahun	9	30%
4.	Di atas 50 tahun	5	16,6%
Jumlah		30	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa 30 responden, yang mempunyai umur antara 20-29 tahun adalah 8 (26,6%) responden. Sementara yang berumur 30-39 tahun adalah 8 (26,6%) responden. Yang memiliki umur

40-49 tahun adalah 9 (30%) responden. Dan yang memiliki umur diatas 50 tahun adalah berjumlah 5 (16,6%) responden.

Dari data distribusi responden berdasarkan umur diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki umur antara 40-49 tahun adalah berjumlah 9 (30%) responden. Pada usia ini merupakan usia produktif para responden.

Tabel2

Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak Sekolah	2	6,6%
2.	SD	3	10%
3.	SLTP/Sederajad	12	40%
4.	SLTA/ Sederajad	8	26,6%
5.	DIPLOMA I/III	2	6,6%
6.	DIPLOMA IV/ STRATA I	3	10%
Jumlah		30	100

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 30 responden, yang tidak mengecap dunia pendidikan sebanyak 2 (6,6%) responden. Responden yang

memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 3 (10%). Responden yang tingkat pendidikannya SLTP/Sederajad sebanyak 12 (40%). Responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTA/Sederajad 8 (26,6%). Responden yang memiliki tingkat pendidikan Diploma I/III sebanyak 2 (6,6%). Responden yang telah mengecap pendidikan Diploma IV/ Strata I sebanyak 3 (10%).

Tabel diatas memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat desa Pulo Piku memiliki tingkat pendidikan SLTP/ Sederajad yaitu sebanyak 12 responden atau (40%).

B. Pembahasan/ Analisis Data

Sebagaimana disebut dalam Bab III bahwa data lapangan diperoleh melalui angket. Setelah angket diisi oleh responden lalu dikumpulkan kembali kemudian dilakukan beberapa langkah. Sebagai langkah pertama adalah mentabulasi hasil jawaban responden.

Tabulasi data dalam hal ini adalah mengelompokkan jawaban responden sesuai pilihan jawaban a, b, dan c disajikan dalam tabel, kemudian dicari presentase masing-masing dari kelompok jawaban sesuai jumlah yang ada dalam kolom frekuensi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jawaban responden menurut pilihan jawaban dari setiap nomor pertanyaan dan disnalisis secara kuantitatif.

Adapun hasil tabulasi angket tanggapan responden dapat dilihat pada tabel-tabel frekuensi yang terdapat dibawah ini :

Tabel3

Apakah anda mengetahui fungsi dari pada partai politik lokal di Aceh.

No.	Alternatif jawaban	F	P
1	a. Ya	18	60 %
	b. Kurang Mengetahui	8	26,6 %
	c. Tidak Mengetahui	4	13,3 %
	Jumlah		100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa 18 (60%) responden menyatakan ya mengetahui fungsi partai politik lokal melalui media masa dan cetak. Sebanyak 8 (26,6%) responden menyatakan kurang mengetahui fungsi partai politik lokal karena hanya mengetahui sebagian saja mengenai fungsi partai politik lokal. Dan 4 (13,3%) responden menyatakan tidak mengetahui fungsi partai politik lokal karena tidak adanya sosialisasi dari partai politik lokal dan pemerintah.

Dari hasil persentase tabel diatas, diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara mengetahui fungsi partai politik lokal yaitu sebanyak 18 (60%) responden. Dari hasil wawancara dengan pak Lapansah, selaku kepala Desa Pulo Piku, menyatakan bahwa fungsi partai politik lokal Dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa partai politik lokal berfungsi sebagai sarana melaksanakan Pendidikan politik bagi anggota masyarakat , penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan

bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, penyerapan, penghimpunan dan penyaluran aspirasi politik rakyat, serta meningkatkan partisipasi politik rakyat.

Tabel4

Apakah anda mengetahui jumlah partai politik lokal pada saat ini.

No.	Alternatif jawaban	F	P
2	a. Ya	9	95 %
	b. Kurang Mengetahui	17	1,7 %
	c. Tidak Mengetahui	4	3,3 %
	Jumlah		100%

Tabel diatas dapat diketahui bahwa 9 (30%) responden menyatakan ya mengetahui jumlah partai politik lokal saat ini masyarakat mengetahuinya pada saat kampanye menjelang pemilu legislatif karena partai politik lokal mencantumkan nama Aceh dalam partai politiknya. Dan 17 (56,6%) responden menyatakan kurang mengetahui mengenai jumlah partai politik lokal pada saat ini, masyarakat bingung karena kurangnya penjelasan dari pemerintah dan partai politik. Serta 4 (13,3%) responden menyatakan tidak mengetahui mengenai jumlah partai politik lokal karena tidak adanya penjelasan dan sosialisasi dari pemerintah dan partai politik lokal kepada masyarakat.

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan kurang mengetahui jumlah partai politik lokal saat ini, yaitu sebanyak 17 (56,6%) responden. Ini menunjukkan bahwa masyarakat bingung Karena kurangnya penjelasan dari pemerintahan dan partai politik lokal.

Tabel 5
Apakah pengurus partai politik lokal di daerah anda pernah mensosialisasikan partai politiknya di desa anda

No.	Alternatif jawaban	F	P
3	a. Ya	14	46,6 %
	b. Kurang Tahu	9	30%
	c. Tidak Pernah	7	23,3 %
	Jumlah		100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa 14 (46,6%) responden menyatakan ya mengetahui pengurus partai politik lokal mensosialisasikan partai politiknya di desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah. Sebanyak 9 (30%) responden menyatakan kurang mengetahui pengurus partai politik lokal mensosialisasikan partai politiknya. Dan 7 (23,3%) responden menyatakan tidak mengetahui

pengurus partai politik lokal mensosialisasikan partai politiknya karena tidak adanya sosialisasi dari partai politik lokal dan pemerintah.

Hal ini dapat diartikan bahwa pengurus partai politik lokal pernah mensosialisasikan partai politiknya kepada masyarakat di desa Pulo Piku kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. yang dibuktikan berdasarkan peresentase diatas yaitu terdapat 14 orang responden (46,6%) yang menjawab ya. berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Supardi, menyatakan bahawa pengurus partai politik lokal pernah mensosialisasikan partai politiknya di desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

Tabel 6

**Apakah partai politik lokal selalu aktif dalam memberikan penyuluhan-
penyuluhan kepada masyarakat di desa anda dalam melaksanakan
pendidikan politik.**

No.	Alternatif jawaban	F	P
4	a. Ya	23	76,6 %
	b. Kurang Mengetahui	6	20 %
	c. Tidak Mengetahui	1	3,3 %
	Jumlah		100%

Tabel di atas dapat diketahui bahwa 23 (76,6%) responden menyatakan ya partai politik lokal selalu aktif dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat di desa Pulo Piku dalam melaksanakan pendidikan politik, masyarakat mendapatkan penyuluhan hanya melalui keluarga yang merupakan kader dari partai politik lokal tersebut. Dan sebanyak 6 (20%) responden menyatakan kurang mengetahui partai politik lokal selalu aktif dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat di desa Pulo Piku. Dan 1 (3,3%) responden menyatakan tidak mengetahui partai politik lokal selalu aktif dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat di desa Pulo Piku. karena menganggap bahwa partai politik lokal mendekati diri kepada masyarakat pada saat kampanye menjelang pemilu saja.

Tabel di atas dapat dilihat bahwa partai politik lokal sudah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. 23 (76,6%) responden menyatakan bahwa partai politik lokal memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat di desa Pulo Piku dalam melaksanakan pendidikan politik. Hasil persentase tersebut di atas memperlihatkan bahwa partai politik lokal sudah menjalankan fungsinya dalam memberikan pendidikan politik, bagi masyarakat agar menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawab sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

Tabel 7

Apakah partai politik lokal sering memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat di desa anda.

No.	Alternatif jawaban	F	P
5	a. Ya	16	53,3 %
	b. Kurang Mengetahui	8	26,6 %
	c. Tidak Mengetahui	6	20 %
	Jumlah		100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa 16 (53,3%) responden menyatakan ya mengetahui partai politik lokal pernah memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat di desa pulo piku. Sebanyak 8 (26,6%) responden menyatakan kurang mengetahui partai politik lokal pernah memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat di desa Pulo Piku. Dan 6 (20%) responden menyatakan tidak mengetahui partai politik lokal pernah memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat di desa Pulo Piku, karena beranggapan partai politik lokal tidak pernah memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat di desa Pulo Piku.

Tabel diatas dapat dilihat bahwa 16 (53,3%) responden menyatakan ya bahwa partai politik lokal sudah memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

Tabel 8

Apakah partai politik lokal sering memberikan sosialisasi pada masyarakat hanya dalam bentuk kampanye.

No.	Alternatif jawaban	F	P
6	a. Ya	14	46,6 %
	b. Kurang mengetahui	9	30 %
	c. Tidak mengetahui	7	23,3 %
	Jumlah		100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa 14 (46,6%) responden menyatakan ya partai politik lokal sering memberikan sosialisasin pada masyarakat hanya dalam bentuk kampanye. Sebanyak 9 (30%)responden menyatakan kurang mengetahui partai politik lokal sering memberikan sosialisasi pada masyarakat karena hanya mengetahui sebagian saja. Dan 7 (23,3%) responden menyatakan tidak mengetahui partai politik lokal pernah memberikan sosialisasi pada masyarakat hanya dalam bentuk kampanye, karena tidak adanya sosialisasi dari partai politik lokal dan pemerintah.

Tabel diatas menunjukan bahwa 14 (46,6%) responden menyatakan partai politik lokal sering memberikan sosialisasi pada masyarakat hanya dalam bentuk kampanye. Dari peresentase diatas, diketahui bahwa hanya dalam keadaan menjelang pemilu saja partai politik lokal mengenalkan diri dan mendekati diri

kepada masyarakat, padahal seharusnya setiap waktu setiap saat partai politik lokal dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama menjalankan fungsinya, serta untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar dapat mengenali partai politik lokal.

Tabel 9

Apakah anda pernah memberikan kritikan atau saran kepada partai politik lokal di daerah anda.

No.	Alternatif jawaban	F	P
7	a. Ya	10	33,3 %
	b. Kurang Mengetahui	10	33,3 %
	c. Tidak Mengetahui	10	33,3 %
	Jumlah		100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa 10 (33,3%) responden menyatakan ya pernah memberikan kritikan atau saran kepada partai politik lokal melalui kader partai politik lokal, karena memiliki hubungan kekerabatan dengan kader partai politik lokal tersebut. Serta 10 (33,3%) responden kurang mengetahui dalam memberikan kritikan atau saran kepada partai politik lokal karena untuk menyampaikan kritikan kepada partai politik lokal sangat sulit, mereka memiliki kantor perwakilan, akan tetapi jarang sekali terbuka. Dan 10 (33,3%) responden

menyatakan tidak mengetahui disebabkan dengan memberikan kritikan atau saran kepada partai politik lokal masyarakat tidak mau berurusan terhadap partai politik lokal, karena mereka takut jika kritikan mereka dipandang keras oleh para kader partai politik lokal dan takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dari persentase data diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat masih sulit untuk memberikan kritikan atau saran kepada partai politik lokal, karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hanah Kabupaten Aceh Tenggara.

Tabel 10

Apakah partai politik lokal sering mensosialisasikan program-program pemerintah serta melibatkan elemen-elemen masyarakat di daerah anda.

No.	Alternatif jawaban	F	P
8	d. Ya	8	26,6 %
	e. Kurang Mengetahui	14	46,6 %
	f. Tidak Mengetahui	8	26,6 %
	Jumlah		100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa 8 (26,6%) responden menyatakan ya pernah pengurus partai politik lokal mensosialisasikan program-program pemerintah serta melibatkan elemen-elemen masyarakat di Desa Pulo Piku. Serta 14 (46,6%) responden menyatakan kurang Mengetahui pengurus partai politik

lokal mensosialisasikan program-program pemerintah serta melibatkan elemen-elemen masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah. Dan 8 (26,6%) responden menyatakan tidak mengetahui pengurus partai politik lokal penar mensosialisasikan program-program pemerintah serta melibatkan elemen-elemen masyarakat di Desa Pulo Piku.

Tabel diatas dapat dilihat bahwa 14 (46,6%) responden menyatakan kurang mengetahui pengurus partai politik lokalmensosialisasikan partai politiknya di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil persentase diatas memperlihatkan bahwa partai politik lokal belum melaksanakan fungsinya dengan baik, padahal dalam kaitan ini, partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat. Wacana politik dari sebuah partai politik dapat dilihat melalui visi, misi dan program-program partai tersebut. Dengan sosialisasi wacana politik ini diharapkan masyarakat akan menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam politik. Sosialisasi politik ini memposisikan rakyat sebagai subyek, tidak lagi sebagai obyek.

Tabel 11

Apakah partai politik lokal pernah melakukan sosialisasi kaderisasi kepada masyarakat di desa anda.

No.	Alternatif jawaban	F	P
9	a. Ya	15	50 %
	b. Kurang Mengetahui	14	46,6 %
	c. Tidak Mengetahui	1	3,3 %
	Jumlah		100%

Tabel diatas dapat diketahui bahwa 15 (50%) responden menyatakan ya partai politik lokal pernah melakukan sosialisasi kaderisasi kepada masyarakat di Desa Pulo Piku. Dan 14 (46,6%) responden menyatakan kurang mengetahui partai politik lokal melakukan sosialisasi kaderisasi kepada masyarakat di Desa Pulo Piku, karena dalam melakukan pengkaderan partai politik lokal hanya mengkader orang-orang tertentu saja. Serta 1 (3,3%) responden menyatakan tidak mengetahui partai politik lokal melakukan sosialisasi kaderisasi kepada masyarakat di Desa Pulo Piku, masyarakat menganggap bahwa partai politik lokal mengkader beberapa orang saja yang dikategorikan sebagai orang yang berada jadi sama saja bahwa partai politik lokal tidak melakukan kaderisasi.

Hasil dari data dapat dilihat bahwa 15 (50%) responden menyatakan ya partai politik lokal pernah melakukan sosialisasi kaderisasi kepada masyarakat di

Desa Pulo Piku, karena partai politik lokal melakukan sosialisasi kaderisasi agar masyarakat tau visi dan misi kader yang diusung oleh partai politik lokal.

Tabel 12

Apakah dalam mengkader anggota-anggotanya partai politik lokal hanya berasal dari kalangan elit atau kalangan yang berstrata tinggi.

No.	Alternatif jawaban	F	P
10	a. Ya	15	50 %
	b. Kurang Mengetahui	10	33,3 %
	c. Tidak Mengetahui	5	16,6 %
	Jumlah		100%

Tabel diatas menunjuk bahwa 15 (50%) responden menyatakan ya partai politik lokal dalam mengkader anggota-anggotanya hanya berasal dari kalangan elit atau kalangan yang berstrata tinggi. Dan 10 (33,3%) responden menyatakan kurang mengetahui partai politik lokal dalam mengkader anggota-anggotanya dari kalangan elit yang berstrata tinggi. Serta 5 (16,6%) responden menyatakan tidak mengetahui bahwa partai politik mengkader anggota-anggotanya dari kalangan elit atau kalangan yang berstrata tinggi.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa partai politik lokal dalam mengkader anggota-anggotanya hanya dari kalangan elit atau kalangan yang

berstrata tinggi. Ini menunjukkan bahwa partai politik lokal melakukan pemilihan social dalam melakukan kaderisasi, tetapi keadaan sosial yang dijadikan patokan. Partai politik lokal melihat strata atau tingkatan dalam melakukan kaderisasi. Partai politik lokal merupakan wadah atau organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomilisi di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat bangsa dan negara.

Tabel13

Apakah partai politik lokal sering memberikan informasi tentang perpolitikan diwilayahnya kepada anda.

No.	Alternatif jawaban	F	P
11	a. Ya	11	36,6 %
	b. Kurang Mengetahui	15	50 %
	c. Tidak Mengetahui	4	13,3 %
	Jumlah		100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa ya 11 (36,6%) responden menyatakan ya partai politik lokal sering memberikan informasi tentang perpolitikan diwilayahnya yaitu melalui keluarga yang merupakan kader partai politik lokal. Dan 15 (30%) responden menyatakan kurang mengetahui partai politik lokal memberikan

informasi perpolitikan diwilayahnya karena partai politik lokal memberikan informasi saat kampanye menjelang pemilu saja, dan itu dilakukan setiap lima tahun sekali. Serta 4 (13,3%) responden menyatakan tidak pernah partai politik lokal memberikan informasi tentang perpolitikan diwilayahnya karena masyarakat menganggap bahwa partai politik lokal seakan menghilang setelah selesai pelaksanaan pemilu, dan melupakan semua kepentingan dan janji mereka terhadap masyarakat.

Dari hasil persentase diatas menunjukkan bahwa 15 (50%) responden menyatakan kurang mengetahui partai politik lokal memberikan informasi tentang perpolitikan diwilayahnya. Hal ini membuat masyarakat kurang mengetahui bagaimana sebenarnya kegiatan perpolitikan partai politik lokal tersebut, seharusnya partai politik lokal memberikan informasi perpolitikan diwilayahnya kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami tentang partai politik lokal.

Tabel 14

apakah partai politik lokal pernah mengadakan komunikasi (dialog) antara masyarakat dengan DPR untuk memperjuangkan kepentingan rakyat

No.	Alternatif jawaban	F	P
12	a. Ya	15	%
	b. Kurang Mengetahui	9	%
	c. Tidak Mengetahui	6	100 %
	Jumlah		100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa 15 (50%) responden menyatakan ya partai politik lokal pernah mengadakan komunikasi (dialog) antara masyarakat dengan DPR untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan 9 (30%) responden menyatakan kurang mengetahui partai politik lokal pernah mengadakan komunikasi (dialog) antara masyarakat dengan DPR. Serta 6 (20%) responden menyatakan tidak mengetahui bahwa partai politik lokal pernah mengadakan komunikasi (dialog) antara masyarakat dengan DPR untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Hasil persentase tabel diatas membuktikan bahwa 15 (50%) responden partai politik lokal sudah menjadi penghubung atau wakil dari masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga terkesan para wakil rakyat dari partai politik lokal terpilih, mereka menjadi penghubung dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Tabel 15

Apakah partai politik lokal memberikan kesempatan kepada masyarakat dari semua golongan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan politiknya

No.	Alternatif jawaban	F	P
13	a. Ya	13	%
	b. Kurang Mengetahui	10	98,3 %

	c. Tidak Mengetahui	7	1,7 %
	Jumlah		100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa ya 13 (43,3%) responden menyatakan yapartai politik lokal memberikan kesempatan kepada masyarakat dari semua golongan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan politiknya. Dan 10 (33,3) responden mengatakan kurang mengetahui partai politik lokal memberikan kesempatan kepada masyarakat dari semua golongan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan politiknya. Serta 7 (23,3%) responden menyatakan tidak mengetahui bahwa partai politik memberikan kesempatan kepada masyarakat dari semua golongan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan politiknya, kerena masyarakat kurangnya informasi dari partai poilitik kepada masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

Tabel diatas dapat dilihat bahwa 13 (43,3%) responden menyatakan ya partai politik lokal memberikan kesempatan kepada masyarakat dari semua golongan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan politiknya ini membuktikan bahwa partai politik lokalmemberi kesempatan kepada semua golongan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan politiknya.

Tabel 16

Apakah partai politik lokal menjalankan fungsinya menciptakan iklim yang kondusif di daerah anda

No.	Alternatif jawaban	F	P
14	a. Ya	10	33,3 %
	b. Kurang mengetahui	15	50 %
	c. Tidak mengetahui	5	16,6 %
	Jumlah		100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa 10 (33,3%) responden menyatakan ya partai politik lokal menjalankan fungsinya menciptakan iklim yang kondusif, karena masyarakat menganggap bahwa kehadiran partai politik lokal telah menciptakan perdamaian di Aceh Tenggara . Dan sebanyak 15 (50%) responden menyatakan kurang mengetahui partai politik lokal menjalankan fungsinya menciptakan iklim yang kondusif, karena masyarakat melihat saat kampanye menjelang pemilu terjadi beberapa kasus penembakan di Aceh. Serta 5 (16,6%) responden menyatakan tidak mengetahui partai politik lokal menjalankan fungsinya menciptakan iklim yang kondusif, karena masyarakat melihat bahwa semenjak adanya partai politik lokal, pasti ada kerusuhan antar masa partai politik pada saat menjelang pemilu dan terjadi juga baku tembak dan serang menyerang terhadap kantor-kantor partai politik lokal maupun nasional.

Tabel diatas diketahui bahwa sebanyak 15 (50%) responden menyatakan kurang mengetahui partai politik lokal menjalankan fungsinya menciptakan iklim yang kondusif. Disini membuktikan bahwa partai politik lokal belum bisa menempatkan diri sebagai sebuah institusi politik yang inklusif yang menampung aspirasi masyarakat dan mendeteksi secara dini potensi dan gejala munculnya konflik dalam masyarakat. Bahkan kerap kali partai politik terlibat langsung dalam konflik antar kelompok masyarakat. Dan kondisi ini terlihat jelas dalam tahapan kampanye, dimana terjadi konflik terbuka antar partai yang memicu munculnya konflik antar kelompok. kurang terlaksananya fungsi partai politik lokal dalam penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat seperti yang terdapat dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa partai politik lokal berfungsi sebagai sarana: Pendidikan politik bagi anggota masyarakat; Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat; Penyerapan, penghimpunan dan penyaluran aspirasi politik rakyat; dan Partisipasi politik rakyat.

Tabel 17

Apakah partai politik lokal menjalankan fungsinya sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kepentingan ataupun tuntutan kepada pemerintah

No.	Alternatif jawaban	F	P
15	a. Ya	19	63,3 %
	b. Kurang mengetahui	6	20 %
	c. Tidak mengetahui	5	16,6 %
	Jumlah		100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 19 (63,3%) responden menyatakan ya partai politik lokal menjalankan fungsinya sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, karena masyarakat menganggap bahwa , kepentingan ataupun tuntutan kepada pemerintah. Serta sebanyak 6 (20%) responden menyatakan kurang mengetahui partai politik lokal menjalankan fungsinya sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kepentingan ataupun tuntutan kepada pemerintah, karena partai politik lokal belum pernah menampung berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat sehingga berbagai kepentingan dan tuntutan masyarakat tidak tersalurkan. Dan 5 (16,6%) responden menyatakan tidak mengetahui Partai politik lokal menjalankan fungsinya sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan

aspirasi, kepentingan ataupun tuntutan kepada pemerintah, karena seakan lupa terhadap fungsi mereka sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kepentingan ataupun tuntutan kepada pemerintah, partai politik lokal dan elit-elit politiknya melupakan semua janji-janji manisnya kepada masyarakat.

Tabel diatas menunjukkan bahwa partai politik lokal yang ada di Desa Pulo Piku sudah menjalankan fungsinya sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kepentingan ataupun tuntutan kepada pemerintah. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase yang ada bahwa sebanyak 19 (63,3%) responden menyatakan ya partai politik lokal menjalankan fungsinya sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kepentingan ataupun tuntutan kepada pemerintah.

Tabel 18

Apakah partai politik lokal sebagai penyemangat dalam pembentukan karakter politik di Desa anda.

No.	Alternatif jawaban	F	P
16	a. Ya	13	43,3%
	b. Kurang mengetahui	11	36,6 %
	c. Tidak mengetahui	6	20 %
	Jumlah		100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 13 (43,3%) responden menyatakan ya partai politik lokal sebagai penyemangat dalam pembentukan krakter politik bagi masyarakat di Desa Pulo Piku. Serta sebanyak 11 (36,6%) responden menyatakan kurang mengetahui partai politik lokal sebagai penyemangat dalam pembentukan krakter politik bagi masyarakat, kerena masyarakat Kurang merasakanya dalam pembentukan krakter politik di Desa Pulo Piku. Dan 6 (20%) responden menyatakan tidak mengetahui partai politik lokal sebagai penyemangat dalam pembentukan krakter politik bagi masyarakat di Desa Pulo Piku, karena masyarakat beranggapan partai politik lokal seakan lupa terhadap fungsinya.

Tabel diatas menunjukkan bahwa partai politik lokal yang ada di Desa Pulo Piku sudah menjadi penyemangat dalam pembentukan krakter politik. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase yang ada bahwa sebanyak 13 (43,3%) responden menyatakan ya partai politik lokal sebagai penyemangat dalam pembentukan krakter politik bagi masyarakat di Desa Pulo Piku.

Tabel 19
Apakah anda mengetahui tujuan dari partai politik lokal

No.	Alternatif jawaban	F	P
17	a. Ya	12	40 %
	b. Kurang mengetahui	10	33,3 %
	c. Tidak mengetahui	8	26,6 %
	Jumlah		100%

Tabel di atas dapat diketahui bahwa 12 (40%) responden menyatakan ya mengetahui tujuan dari partai politik lokal, masyarakat mendapatkan informasi tentang tujuan partai politik lokal hanya melalui informasi yang diperoleh melalui koran. 10 (33,3%) responden menyatakan kurang mengetahui mengenai tujuan partai politik lokal karena mereka sangat jarang sekali mendengar tentang partai politik lokal, mereka hanya mendengarnya saat kampanye menjelang pemilu. 8 (26,6%) responden menyatakan tidak mengetahui mengenai tujuan partai politik lokal karena masyarakat menganggap keberadaan partai politik lokal itu tidak penting bagi masyarakat.

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Pulo Piku menyatakan ya mengetahui tujuan dari partai politik lokal yang berada di Aceh, yang dibuktikan berdasarkan persentase di atas yaitu terdapat 12 orang responden (40%) yang menjawab ya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Arabbudin, menyatakan bahwa tujuan partai politik lokal Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Tujuan tersebut dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus (pasal 78 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan :

Tujuan Umum Partai Politik Lokal adalah :

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;

- b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan Rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.

Tujuan Khusus Partai Lokal adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.
- c. Tujuan Partai Politik Lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diwujudkan secara konstitusional.

Tabel 20

Apakah anda mengetahuisejarah dari partai politik lokal di Aceh.

No.	Alternatif jawaban	F	P
18	a. Ya	13	43,3 %
	b. Kurang mengetahui	8	26,6 %
	c. Tidak mengetahui	9	30 %
	Jumlah		100%

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui tentang sejarah terbentuknya partai politik lokal di Aceh. Maka responden yang menyatakan ya adalah sebanyak 13 orang responden (43,3%) masyarakat mengetahuinya melalui media masa seperti koran dan televisi pasca penandatanganan MoU Helsinki antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005, kemudian yang menyatakan kurang mengetahui sebanyak 8 orang responden (26,6%) karena mereka hanya mengetahui tentang partai politik lokal hanya muncul pada saat pemilu saja, sedangkan yang menyatakan tidak tahu adalah sebanyak 9 orang responden (30%) mereka menganggap bahwa isu-isu tentang partai politik itu tidak penting karena tidak berpengaruh terhadap keadaan mereka.

Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat mengetahui tentang sejarah terbentuknya partai politik lokal di Aceh yaitu pasca penandatanganan MoU Helsinki antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005, dapat dibuktikan berdasarkan persentase diatas yaitu terdapat 13 (43,3%) orang responden yang menjawab ya.

Tabel 21

Apakah partai politik lokal hanya melakukan sosialisasi ketika mau Pilkada saja

No.	Alternatif jawaban	F	P
19	a. Ya	14	46,6 %
	b. Kurang mengetahui	9	30 %
	c. Tidak mengetahui	7	23,3 %
	Jumlah		100%

Tabel diatas diketahui bahwa 14 (46,6%) responden menyatakan ya partai politik lokal hanya melakukan sosialisasi pada masyarakat hanya mau Pilkada saja di Desa Pulo Piku. Serta 9 (30%) responden menyatakan kurang mengetahui partai politik lokal hanya melakukan sosialisasi ketikamau Pilkada saja, karena untuk menarik simpatisan dari masyarakat agar mendapat dukungan masyarakat. Dan 7 (23,3%) responden menyatakan tidak mengetahui partai politik melakukan sosialisasi hanya mau Pilkada saja, karena masyarakat menganggap partai politik lokal hanya menarik simpatisan dari masyarakat agar mendapat dukungan dari masyarakat.

Tabel diatas menunjukkan bahwa 14 (46,6%) responden menyatakan partai politik lokal melakukan sosialisasi pada masyarakat ketika mau Pilkada saja. Dari hasil persentase diatas, diketahui bahwa partai politik lokal melakukan ketika

mau Pilkada saja, karena partai politik lokal mengenalkan diri dan mendekati diri kepada masyarakat.

Tabel 22

Apakah partai politik lokal menjalankan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat di Desa anda

No.	Alternatif jawaban	F	P
20	a. Ya	15	50 %
	b. Kurang mengetahui	9	30 %
	c. Tidak mengetahui	6	20 %
	Jumlah		100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat berpendapat bahwa partai politik lokal di Aceh memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat Aceh dalam menjalankan tujuan mensejahterakan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia maka responden yang menyatakan ya adalah sebanyak 15 orang responden (50%). Dan sebanyak 9 (30%) responden menyatakan kurang mengetahui tujuan partai politik lokal dalam menjalankan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Pulo Pikuu karena kurang mementingkan kepentingan rakyat. Serta 6 (20%) responden menyatakan tidak mengetahui tujuan partai politik lokal untuk

mensejahterakan masyarakat di Desa Pulo Piku, karena hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan semata.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan tujuan dari partai politik lokal baik sekali. Kehadiran partai politik lokal diharapkan mampu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945; mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh; Meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh yang diwujudkan secara konstitusional seperti yang telah tertulis dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pasal 78 ayat (1), (2) dan (3).

Tabel 4.23**Tabulasi Jawaban Responden Secara Keseluruhan**

No. Tabel	Pilihan Jawaban						N = 30
	A		B		C		
	F	P	F	P	F	P	f = 100
1	18	60 %	8	26,6 %	4	13,3 %	30
2	9	30 %	17	56,6 %	4	13,3 %	30
3	14	46,6 %	9	30 %	7	23,3 %	30
4	23	76,6 %	6	20 %	1	3,3%	30
5	16	53,3 %	8	26,6 %	6	20 %	30
6	14	46,6 %	9	30%	17	23,3 %	30
7	10	33,3 %	10	33,3 %	10	33,3 %	30
8	8	26,6 %	14	46,6 %	8	26,6 %	30
9	15	50 %	14	46,6 %	1	3,3%	30
10	15	50 %	10	33,3 %	5	16,6 %	30
11	11	36,6 %	15	50 %	4	13,3 %	30
12	15	50 %	9	30 %	6	20 %	30

13	13	43,3 %	10	33,3 %	7	23,3 %	30
14	10	33,3 %	15	50 %	5	16,6 %	30
15	19	63,3 %	6	20 %	5	16,6 %	30
16	13	43,3 %	11	36,6 %	6	20 %	30
17	12	40 %	10	33,3 %	8	26,6 %	30
18	13	43,3 %	8	26,6 %	9	30 %	30
19	14	46,6 %	9	30 %	7	23,3 %	30
20	15	50 %	9	30 %	6	20 %	30

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari data-data yang diperoleh dan setelah data-data terkumpulkan melalui penelitian lapangan diolah dan dianalisa dengan menggunakan tabel frekuensi, maka hasil-hasil yang diperoleh sebagai temuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Responden menyatakan mengetahui fungsi partai politik lokal yaitu sebanyak 18 responden (60%). Dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa partai politik lokal berfungsi sebagai sarana melaksanakan Pendidikan politik bagi anggota masyarakat , penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, penyerapan,

penghimpunan dan penyaluran aspirasi politik rakyat, serta meningkatkan partisipasi politik rakyat.

2. Responden menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan kurang mengetahui jumlah partai politik lokal saat ini, yaitu sebanyak 17 (56,6%) responden. Ini menunjukkan bahwa masyarakat bingung Karena kurangnya penjelasan dari pemerintahan dan partai politik lokal.
3. Responden menyatakan bahwa pengurus partai politik lokal pernah mensosialisasikan partai politiknya kepada masyarakat di desa Pulo Piku kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. yang dibuktikan berdasarkan peresentase diatas yaitu terdapat 14 orang responden (46,6%) yang menjawab ya. berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Supardi, menyatakan bahawa pengurus partai politik lokal pernah mensosialisasikan partai politiknya di desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Responden diatas dapat dilihat bahwa partai politik lokal sudah menjalankan fungsinya sebagaimana mustinya. 23 (76,6%) responden menyatakan bahwa partai politik lokal memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat di desa Pulo Piku dalam melaksanakan pendidikan politik. Hasil persentase tersebut diatas memperlihatkan bahwa partai politik lokal sudah menjalankan fungsinya dalam memberikan pendidikan politik, bagi masyarakat agar menjadi manusia

yang sadar akan tanggung jawab sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

5. Tabel diatas dapat dilihat bahwa 16 (53,3%) responden menyatakan ya bahwa partai politik lokal sudah memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Tabel diatas menunjukkan bahwa 14 (46,6%) responden menyatakan partai politik lokal sering memberikan sosialisasi pada masyarakat hanya dalam bentuk kampanye. Dari peresentase diatas, diketahui bahwa hanya dalam keadaan menjelang pemilu saja partai politik lokal mengenalkan diri dan mendekati diri kepada masyarakat, padahal seharusnya setiap waktu setiap saat partai politik lokal dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama menjalankan fungsinya, serta untuk mendekati diri kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar dapat mengenali partai politik lokal.
7. Dari persentase data diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat masih sulit untuk memberikan kritikan atau saran kepada partai politik lokal, karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hanah Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Tabel diatas dapat dilihat bahwa 14 (46,6%) responden menyatakan kurang mengetahui pengurus partai politik lokalmensosialisasikan partai politiknya di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil persentase diatas memperlihatkan bahwa partai politik

lokal belum melaksanakan fungsinya dengan baik, padahal dalam kaitan ini, partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat. Wacana politik dari sebuah partai politik dapat dilihat melalui visi, misi dan program-program partai tersebut. Dengan sosialisasi wacana politik ini diharapkan masyarakat akan menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam politik. Sosialisasi politik ini memposisikan rakyat sebagai subyek, tidak lagi sebagai obyek.

9. Hasil dari data dapat dilihat bahwa 15 (50%) responden menyatakan ya partai politik lokal pernah melakukan sosialisasi kaderisasi kepada masyarakat di Desa Pulo Piku, karena partai politik lokal melakukan sosialisasi kaderisasi agar masyarakat tau visi dan misi kader yang diusung oleh partai politik lokal.
10. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa partai politik lokal dalam mengkader anggota-anggotanya hanya dari kalangan elit atau kalangan yang berstrata tinggi. Ini menunjukkan bahwa partai politik lokal melakukan pemilihan social dalam melakukan kaderisasi, tetapi keadaan sosiallah yang dijadikan patokan. Partai politik lokal melihat strata atau tingkatan dalam melakukan kaderisasi. Partai politik lokal merupakan wadah atau organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomilisi di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat bangsa dan negara.

11. Dari hasil persentase diatas menunjukkan bahwa 15 (50%) responden menyatakan kurang mengetahui partai politik lokal memberikan informasi tentang perpolitikan diwilayahnya. Hal ini membuat masyarakat kurang mengetahui bagaimana sebenarnya kegiatan perpolitikan partai politik lokal tersebut, seharusnya partai politik lokal memberikan informasi perpolitikan diwilayahnya kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami tentang partai politik lokal.
12. Hasil persentase tabel diatas membuktikan bahwa 15 (50%) responden partai politik lokal sudah menjadi penghubung atau wakil dari masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga terkesan para wakil rakyat dari partai politik lokal terpilih, mereka menjadi penghubung dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
13. Tabel diatas dapat dilihat bahwa 13 (43,3%) responden menyatakan ya partai politik lokal memberikan kesempatan kepada masyarakat dari semua golongan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan politiknya ini membuktikan bahwa partai politik lokalmemberi kesempatan kepada semua golonganuntuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan politiknya.
14. Tabel diatas diketahui bahwa sebanyak 15 (50%) responden menyatakan kurang mengetahui partai politik lokal menjalankan fungsinya menciptakan iklim yang kondusif. Disini membuktikan bahwa partai politik lokal belum bisa menempatkan diri sebagai sebuah institusi politik yang inklusif yang menampung aspirasi masyarakat dan mendeteksi secara dini potensi dan gejala munculnya konflik dalam masyarakat. Bahkan

kerap kali partai politik terlibat langsung dalam konflik antar kelompok masyarakat. Dan kondisi ini terlihat jelas dalam tahapan kampanye, dimana terjadi konflik terbuka antar partai yang memicu munculnya konflik antar kelompok. kurang terlaksananya fungsi partai politik lokal dalam penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat seperti yang terdapat dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa partai politik lokal berfungsi sebagai sarana: Pendidikan politik bagi anggota masyarakat; Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat; Penyerapan, penghimpunan dan penyaluran aspirasi politik rakyat; dan Partisipasi politik rakyat.

15. Tabel diatas menunjukkan bahwa partai politik lokal yang ada di Desa Pulo Piku sudah menjalankan fungsinya sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kepentingan ataupun tuntutan kepada pemerintah. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase yang ada bahwa sebanyak 19 (63,3%) responden menyatakan ya partai politik lokal menjalankan fungsinya sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kepentingan ataupun tuntutan kepada pemerintah.
16. Tabel diatas menunjukkan bahwa partai politik lokal yang ada di Desa Pulo Piku sudah menjadi penyemangat dalam pembentukan karakter politik. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase yang ada bahwa sebanyak 13 (43,3%) responden menyatakan ya partai politik lokal sebagai

penyemangat dalam pembentukan karakter politik bagi masyarakat di Desa Pulo Piku.

17. Responden menyatakan mengetahui tujuan dari partai politik lokal yaitu sebanyak 12 (55%). Dari hasil persentasi diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki wawasan yang cukup mengenai partai politik lokal, karena mereka menganggap bahwa keberadaan partai politik lokal di Aceh merupakan hal yang sangat istimewa.
18. Masyarakat mengetahui tentang sejarah dari partai politik lokal di Aceh dengan jawaban responden sebanyak 13 orang (43,3%). Pasca penandatanganan MoU antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini menandakan bahwa masyarakat mengikuti perkembangan politik dan perdamaian yang terjadi di Aceh.
19. Tabel diatas menunjukkan bahwa 14 (46,6%) responden menyatakan partai politik lokal melakukan sosialisasi pada masyarakat ketika mau Pilkada saja. Dari hasil persentase diatas, diketahui bahwa partai politik lokal melakukan ketika mau Pilkada saja, karena partai politik lokal mengenalkan diri dan mendekati diri kepada masyarakat.
20. Responden menyatakan tujuan partai politik lokal baik sekali. Yaitu sebanyak 15 responden (50%). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan tujuan dari partai politik lokal baik sekali. Kehadiran partai politik lokal diharapkan mampu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945; mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh; Meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh yang diwujudkan secara konstitusional seperti yang telah tertulis dalam pasal 78 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Dari hasil observasi, wawancara dan penelitian diperoleh gambaran bahwa masyarakat di Desa Pulo Piku kecamatan Darul Hasanah Aceh Tenggara menunjukkan tingkat keingin tahun yang tinggi mengenai partai politik lokal di Aceh. Masyarakat mengetahui sejarah terbentuknya partai politik lokal di Aceh serta mereka juga beranggapan bahwa pembentukan partai politik lokal tersebut memiliki tujuan yang sangat baik yaitu terutama dalam menciptakan kondisi perdamaian di Aceh sehingga masyarakat dapat secara tenang dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Partai politik lokal di Desa Pulo Piku kecamatan Darul Hasanah kabupaten Aceh Tenggara belum melaksanakan fungsinya secara maksimal hal ini terlihat dari tidak adanya wacana politik politik yang ditawarkan kepada masyarakat, serta minimnya pendidikan politik, sosialisasi politik dan rekrutmen politik atau

kaderisasi politik yang dilakukan partai politik lokal terhadap masyarakat di desa Pulo Piku kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Selain itu partai politik juga tidak melakukan pendewasaan politik kepada masyarakat. Sudah seharusnya partai politik lokal mengubah pola perilaku politik yang diterapkan pada saat ini sehingga tidak bertentangan dengan fungsi partai politik yang sebenarnya. Struktur dan infrastruktur yang dimiliki oleh sebagian besar partai politik lokal yang umurnya masih sangat relatif baru sehingga sangat tidak memadai bagi terealisasinya fungsi-fungsi dari partai politik lokal tersebut. Hal ini dimungkinkan karena usianya yang masih relatif muda, sehingga dibutuhkan waktu yang panjang untuk mematangkan dan menguatkan struktur dan infrastruktur partai politik lokal sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sebagian besar partai politik lokal masih cenderung belum memiliki pemikiran politik yang dewasa, terutama masih menempatkan pemilu sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan semata. Pemilu hanya dilihat sebagai alat untuk mendapatkan jatah kursi di legislatif. Fungsi lain dari pemilu diabaikan begitu saja. Akibatnya, partai politik terjebak pada pragmatis dan cenderung menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Fungsi dari partai politik tersebut pada akhirnya akan mengurangi kualitas dari partai politik tersebut dan secara langsung juga mengurangi kualitas dari penyelenggaraan pemilu, terutama berkaitan dengan pendidikan dan pendewasaan politik masyarakat.

Sudah seharusnya partai politik lokal menempatkan dirinya sebagai wadah bagi masyarakat dalam menanggapi dan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat dan bukan mendahulukan kepentingan pribadi, segelintir orang

maupun golongan tertentu saja. Serta sudah sewajarnya masyarakat merasakan manfaat dan kebaikan dari hadirnya partai politik lokal yang berada ditengah-tengah masyarakat, bukan hanya pada saat kampanye menjelang pemilu saja partai politik mendekati diri kepada masyarakat.

Kondisi politik diatas mengisyaratkan perlunya perubahan yang dilakukan oleh partai politik lokal serta elit-elit politik harus lebih mampu mendekati diri kepada masyarakat serta mengelola berbagai perbedaan dan kepentingan yang ada di masyarakat. Hal ini diperlukan demi menjaga stabilitas dan perdamaian yang telah tercipta selama ini serta agar terciptanya masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Aceh melalui pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam sistem politik dan negara demokrasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

Partai politik lokal merupakan sarana baru bagi masyarakat Aceh khususnya bagi masyarakat di desa Pulo Piku kecamatan Darul Hasanah kabupaten Aceh Tenggara dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kehadiran partai politik lokal merupakan realisasi dari penandatanganan MoU (Memorandum Of Understanding) Helsinki dan merupakan wujud dari realisasi demokrasi dan perdamaian di Aceh. Dengan demikian partai politik lokal di Aceh memiliki fungsi melaksanakan pendidikan politik bagi anggota masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, penyaluran aspirasi politik masyarakat, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat di desa Pulo Piku kecamatan Darul Hasanah kabupaten Aceh Tenggara.

Namun berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, pemberian angket serta wawancara dengan masyarakat desa Pulo Piku kecamatan Darul Hasanah kabupaten Aceh Tenggara diperoleh hasil bahwa pada perkembangannya, masyarakat belum bisa merasakan manfaat dari keberadaan partai politik lokal di desa tersebut karena pelaksanaan fungsi partai politik lokal belum berjalan dengan baik.

B. Saran

Diharapkan kepada partai politik lokal yang ada di desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara agar lebih aktif dalam melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat, agar masyarakat dapat merasakan manfaat akan keberadaan partai politik lokal tersebut. Serta partai politik lokal harus lebih aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat di desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah mempunyai kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajibannya dalam negara demokrasi.

Partai politik lokal juga diharapkan lebih mampu meningkatkan fungsinya terutama dalam menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya di desa Babel Gabungan kecamatan Babel kabupaten Aceh Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV.Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*.(edisi revisi 2010). Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*.(edisi revisi VI). Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*. (edisi revisi 2011). Jakarta: Rajawali Pers.
- Fadjar, Abdul Mukthie. 2013. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Edisi revisi.Malang: Setara Press.
- Gatara, Said dan Said, Dzulkiah.2007. *Sosiologi Politik : Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Jauhari, Herman.2007. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pamungkas, Sigit. 2012. *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism (IDW).
- Philipus dan Aini, Nurul. 2011. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmad.2000. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Romli, Nur, dkk. 2013. *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik – LIPI (P2P - LIPI).
- Safa'at, Muchamad Ali. 2011. *Pembubaran Partai Politik : Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, Deni. 2013. *Metodelogo Penelitian : Teknik Penulisan Skripsi*. Medan: Laboratorium PPKn Fakultas Ilmu Sosial Unimed.
- Surbakti, Ramlan. 2010.*Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Winardi. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai
Politik Lokal di Aceh.

MoU (Memorandum Of Understanding) di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus
2005. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan
Aceh Merdeka.